

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah makhluk ciptaan ALLAH SWT yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di dalam pemerintahan. Sebab tanpa perempuan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, begitu juga dalam politik. Perempuan berhak berpartisipasi memberikan pendapat, hak suara, bahkan perempuan berhak menjadi pemimpin. Tapi, sampai sekarang perempuan masih saja di diskriminasi baik dalam lingkungan pekerjaan, sekolah, masyarakat, bahkan dalam keluarga. Perempuan hanya dibolehkan mengikuti perintah orang tua (bapak) dan tidak berhak menolak karena budaya *patriarki* di masyarakat yang masih mendominasi dalam kehidupan. Perempuan dianggap sebagai pelengkap bagi kepentingan laki-laki. Akibatnya, perempuan hanya ditempatkan pada ranah domestik saja sedangkan laki-laki ditempatkan pada ranah publik. Karena persepsi ini timbul berbagai bentuk kekerasan, penindasan, diskriminasi terhadap perempuan.

Padahal di zaman penjajahan Belanda sudah banyak perempuan Indonesia yang berjuang melawan penjajah, sebut saja Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, seorang perempuan Aceh yang meneruskan perjuangan suami mereka yaitu Teuku Umar dan Teuku Cik Ditiro. Di Jawa ada Raden Ayu Ageng Serang, di Maluku Christinus Martha Trahahu bersama suaminya Pattimura yang melawan penjajahan Belanda.

Pada tahun 1905, Dewi Sartika mendirikan sekolah "Keutamaan Istri" di Bandung. Tahun 1912, Kartini mendirikan sekolah perempuan di Semarang. Tahun 1915, Rahma Eljunusia dan adiknya Zaunuddin Labai Eljunusia, mendirikan sekolah agama di Minangkabau. Pada masa itu, semangat kebangsaan dan kebencian hidup dijajah telah membangkitkan semangat untuk berubah. Sehingga perempuan Indonesia berperan dalam membangun organisasi dan berkiprah di bidang politik. Pada tahun 1912 lahirlah organisasi perempuan yang pertama dengan nama Poetri Mardika. Karena kesadaran akan pentingnya gerakan perempuan sehingga muncul organisasi kedaerahan seperti Poetri sejati, Wanita Oetama dan lain-lainnya. Kemudian berdiri juga organisasi keagamaan seperti Aisyah, Muslimat NU, Poesara wanita Khatolik. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta semua organisasi perempuan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia Nasional untuk pertama kalinya. Yang diikuti oleh 30 organisasi perempuan dan membentuk Perserikatan Perhimpunan Perempoean Indonesia (PPPI).

Menurut Soekarno dalam Murniati Nunuk P (2004; 21) gerakan perempuan Indonesia dikategorikan sebagai berikut:

1. Periode sebelum penjajahan, tidak/belum banyak terekam faktanya.
2. Periode tahun 1602–1928 sifat gerakan masih individual.
3. Periode tahun 1928–1945 gerakan perempuan sebagai ibu, paham ibuisme melawan penjajahan.
4. Periode tahun 1946–1965, gerakan perempuan melawan kemiskinan.
5. Periode tahun 1966–1980, gerakan PKK, perempuan berpartisipasi dalam pembangunan.